

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan kinerja juga merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya, dalam rangka penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini dianggap sebagai bentuk pemberian kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola daerah sehingga daerah diharapkan mampu mandiri dan mengeksplorasi potensi-potensi daerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumber daya dan kepercayaan yang diamanatkan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah disusun sebelumnya. Adapun tata cara penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Selatan Tahun Anggaran 2022 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Kecamatan Dumai Selatan dalam bentuk perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA). Program-program yang tercantum dalam RENSTRA, Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Aksi dari Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Kegiatan (RKK), Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini disusun berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan secara teknis, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Esensi dari Sistem AKIP bagi Kecamatan Dumai Selatan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di bidang pelayanan pemerintah khususnya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Kecamatan Dumai Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang dilaksanakan. Atas dasar tersebut, siklus Sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Kecamatan Dumai Selatan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Dumai Selatan. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) memiliki dua fungsi utama sekaligus :

1. Laporan Kinerja merupakan sarana menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Walikota Dumai, DPRD dan masyarakat).
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

### C. Isu Strategis

Kecamatan Dumai Selatan merupakan pemekaran wilayah Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Selatan pada tanggal 02 September 2009 yang berjumlah 10 (sepuluh) Kelurahan, Kecamatan Dumai Kota terdiri 5 (lima) Kelurahan dan Kecamatan Dumai Selatan terdiri 5 (lima) Kelurahan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, berbagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan ditingkat kecamatan yang diberikan harus sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam hal ini Kecamatan Dumai Selatan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan secara optimal untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, permasalahan utama (***strategic issued***) yang dihadapi oleh Kecamatan Dumai Selatan adalah :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sebagaimana amanat Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 belum diterapkan di Kecamatan, sehingga posisi Kecamatan hanya turut serta memberikan pelayanan/membantu pelaksanaan urusan Perangkat Daerah terkait.
2. Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang memiliki unit kerja/petugas ataupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditingkat Kecamatan belum melakukan koordinasi yang baik dengan Kecamatan dan belum melaksanakan pelayanan terpadu serta dalam aktifitasnya tidak berkantor di Kantor Camat, namun masih berkantor di Kantor Dinas/Badan terkait.
3. Kecamatan hanya melakukan tugas atribut yakni melaksanakan tugas Pemerintahan Umum, mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,

mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan per undang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan serta membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Sedangkan tugas delegatif/pelimpahan wewenang hanya sebagian kecil saja yang dilimpahkan kepada Kecamatan.

4. Sumberdaya aparatur kelurahan dan kecamatan yang belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta masih kurangnya sarana kerja baik termasuk didalamnya penggunaan aplikasi pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi yang memadai dalam mendukung terwujudnya *e-government* dan *smart city*.

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, maka struktur organisasi Kecamatan Dumai Selatan terdiri dari :

##### **Kecamatan :**

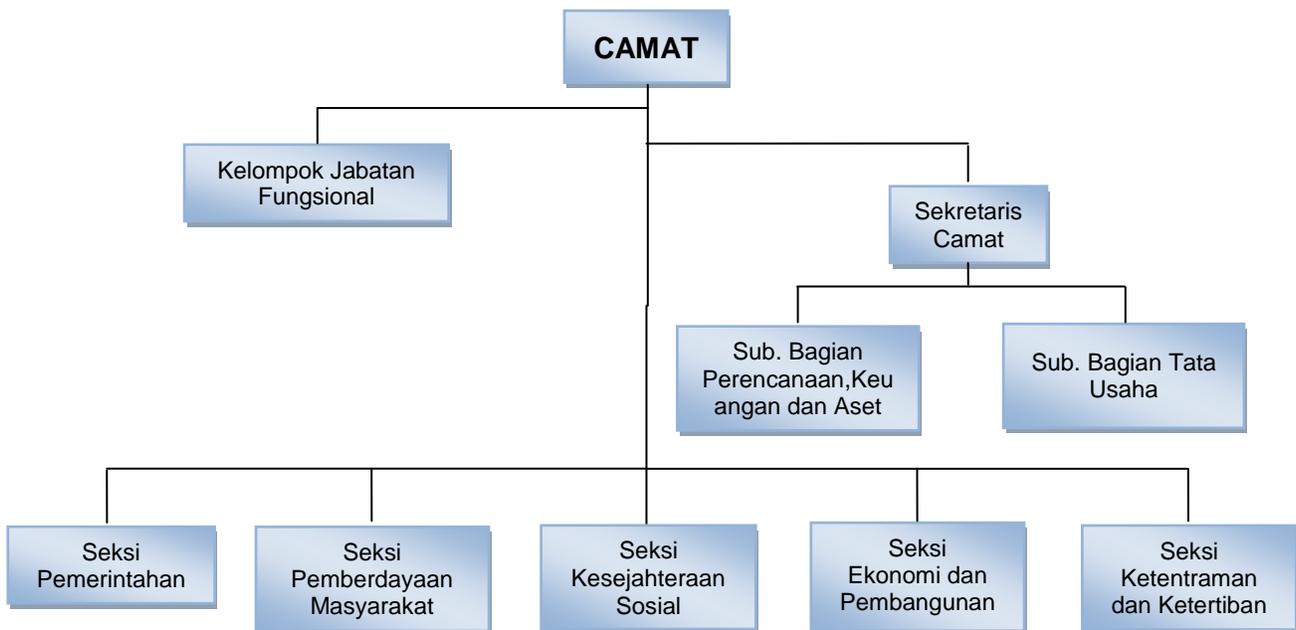
1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

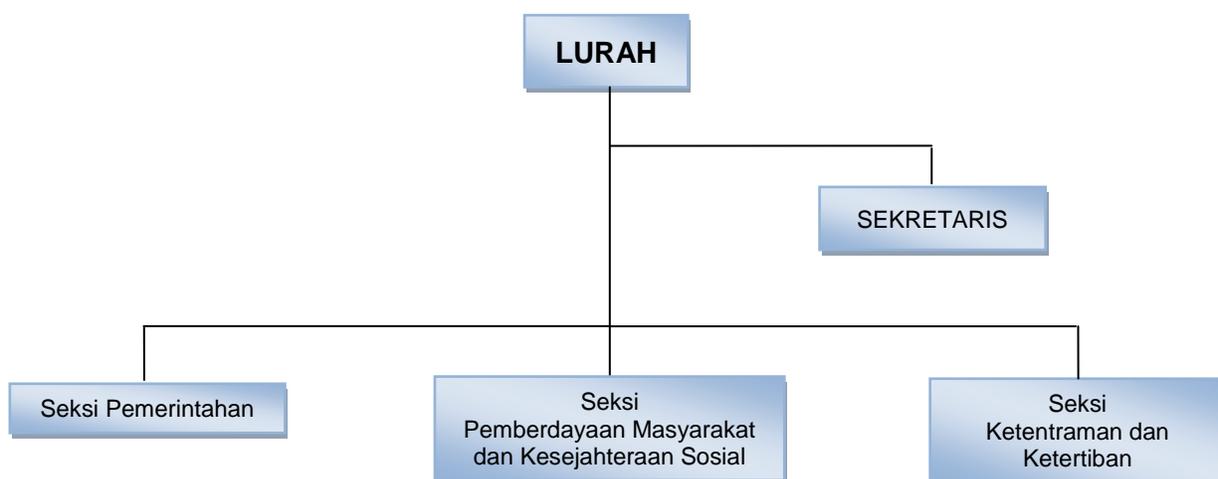
**Kelurahan :**

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Bagan Organisasi di bawah ini :

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN DUMAI KOTA**



**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN****E. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1) ;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 ;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Selatan ;

11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) ;
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 28 Seri D) ;
13. Peraturan Walikota Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ;
14. Keputusan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Camat.

## **F. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) ini mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

### **SISTEMATIKA LKj-IP PERANGKAT DAERAH**

#### **Bab I – Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja****A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Perangkat daerah untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah. Untuk Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja perangkat daerah sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

**Bab IV – Penutup**

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Selatan Tahun Anggaran 2022 ini memberikan gambaran pencapaian kinerja dalam tahun 2022, dikaitkan dengan Rencana Strategis Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2022.

#### A. Perencanaan Kinerja

Untuk mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Pemerintah Kota Dumai mempunyai Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu ”.***

Kecamatan Dumai Selatan merupakan bagian Pemerintah Kota Dumai juga mempunyai visi dan misi yang harus mendukung visi dan misi pemerintah Kota Dumai tersebut, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung strategi dan kebijakan Pemerintah Kota Dumai.

Adapun visi dan misi Kecamatan Dumai Selatan ini diupayakan pula berlaku mulai tahun 2021 s/d 2026, dengan pernyataan misi Dumai Selatan sebagai berikut :

**MISI :*****“Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik”***

Seiring dengan visi Kota Dumai tersebut, Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang merupakan ujung tombak pelayanan pemerintah merupakan salah satu unsur Perangkat Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Selama ini, keberadaan Kecamatan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak massa dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Kedepan diprediksikan Kecamatan akan lebih mempunyai peran dan fungsi yang lebih penting disebabkan faktor kedekatan kepada masyarakat dan pengetahuannya yang lebih berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di lingkungan.

Dalam pencapaian visi diperlukan pernyataan misi-misi sesuai dengan karakteristik organisasi Kecamatan Dumai Selatan. Adapun 5 (lima) misi Kecamatan Dumai Selatan sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada pelabuhan dan industry
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berjiwa melayu
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dari 4 (empat) Misi Pembangunan, misi yang sesuai untuk Kecamatan Dumai Selatan adalah Misi ke-4, yaitu “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik “

Sebagai salahsatu perangkat daerah, maka Kantor kecamatan Dumai Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pembangunan walikota Dumai sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategis penting untuk mensosialisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Dumai Selatan. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi, adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<i>MISI 4 : Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik</i>				
1.	1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi;	1.1. Meningkatkannya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	1.1.1. Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.1.1.1. Mewujudkan Sistem Organisasi Tata Kerja yang Efektif dan Efisien. 1.1.1.2. Meningkatkan Kondisi Pelayanan Publik yang sesuai dengan Standar Pelayanan Prima. 1.1.1.3. Meningkatkan Kapasitas dan Manajemen Pengawasan Internal 1.1.1.4. Mewujudkan Tata Laksana Aparatur Daerah yang memenuhi 5 Syarat Profesionalisme (Menguasai pekerjaan, Loyalitas-Integritas, Visi, Motivasi, Komitmen, Kebanggaan.

			1.1.2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1.Meningkatkan Peneglolaan Aset Daerah 1.1.2.2 Mengoptimalkan Pendapatan Daerah  1.1.2.3. Mengoptimalkan BUMD sebagai Sumber Pendapatan Pendapatan Daerah. 1.1.2.4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
		1.2. Meningkatkan Nya kualitas pelayanan publik;	1.2.1. Pelaksanaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien berbasis IT	1.2.1.1 Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1.2.1.2 Mewujudkan Saluran Akses Formal Aspirasi Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik.

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan pada RPJMD 2021-2026, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti tabel II.1 berikut :

**Tabel II.1**  
**SASARAN STRATEGIS RPJMD KOTA DUMAI 2021 - 2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET					Kondisi Akhir (%) s/d 2026
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Reformasi Birokrasi;	Indeks Kepuasan masyarakat	Persen	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan Trantibum	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan kepada camat	Persen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Indikator Kinerja Program berdasarkan sasaran strategis RPJMD Dumai Selatan 2021-2026 sebagai berikut :

❖ **Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik**

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

❖ **Kualitas sumberdaya lembaga pemberdayaan masyarakat**

1. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan Keuangan
2. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
3. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
4. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
5. Program pengembangan wawasan kebangsaan

❖ **Persentase swadaya masyarakat terhadap program Pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

1. Program Peningkatan Kinerja LPMK dan RT
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
3. Program penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah
4. Program peningkatan kinerja lembaga masyarakat kecamatan
5. Program pengembangan Data/informasi
6. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk sasaran prioritas program pada Kecamatan Dumai Selatan menyesuaikan dengan Program Lima Tahunan RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel II.2 berikut :

**Tabel II.2**  
**SASARAN PRIORITAS PROGRAM KECAMATAN DUMAI SELATAN**  
**TAHUN 2022**

No	SASARAN PRIORITAS PROGRAM	JUMLAH PROGRAM
1	2	3
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <b>Rp 9.671.130.889,-</b> 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik <b>Rp 68.300.250,-</b> 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan <b>Rp 626.428.450,-</b> 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum <b>Rp 100.000.000</b> 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum <b>Rp 10.400.000,-</b>

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2022 menyesuaikan dengan Misi RPJMD Kota Dumai 2021 – 2026, lebih jelasnya dapat dilihat seperti tabel II.3 berikut :

**Tabel II.3**  
**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**KECAMATAN DUMAI SELATAN**  
**TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1	2	3	4	5
1.	<b>Misi 4 : Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik</b> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik  2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat  3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat	%  %  %	100  100  100

Cara yang ditempuh oleh Kecamatan Dumai Selatan untuk mencapai sasaran beserta indikator sasaran tersebut adalah dengan melaksanakan 5 (Lima) program dan 14 (Empat belas) kegiatan yang telah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah. Program dan kegiatan Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

---

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM / KEGIATAN</b>
<b>I.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d.	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
e.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
g.	SKPD
h.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
<b>3.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah</b>
a.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
<b>4.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
a.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
<b>5.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
f.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
a.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
b.	Pengadaan Mebel

---

- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
  - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  
Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau
  - d. bangunan lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**
- 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**
- a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
- a. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**
- Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan
- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**
- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 
-

- c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

#### **IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

##### **1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

- a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

#### **V. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum**

##### **1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

- a. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

### **B. Perjanjian Kinerja**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Kecamatan Dumai Selatan 2021 – 2026, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) disusun setiap tahunnya. Laporan Kinerja (LKj) ini menjabarkan target yang dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini mempresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 Kecamatan Dumai Selatan merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk tahun 2022.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
- b. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya
- c. Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah
- d. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan)/*punishment* (sanksi).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.4 berikut :

**Tabel II.4**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KECAMATAN DUMAI SELATAN**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN 2022
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	1. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	%	100 %
		2. Kualitas sumber daya lembaga masyarakat	%	100 %
		3. Persentase swadaya masyarakat terhadap program Pembangunan melalui pemberdayaan Masyarakat meningkat	%	100 %

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi pada Kecamatan Dumai Selatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 ada 7 (Tujuh) program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2022 Kantor Camat Dumai Selatan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

**Tabel II.5**  
**ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT SASARAN STRATEGIS SKPD TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	Rp 10.476.259.589,-	100	Rp 10.178.026.757	97,15 %
		Kualitas sumber daya lembaga masyarakat				
		Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat				
<b>Jumlah</b>			Rp 10.476.259.589,-		Rp 10.178.026.757	

Secara umum Kecamatan Dumai Selatan telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk sasaran tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 100%.

Jumlah anggaran untuk 3 (tiga) indikator ini sebesar Rp 10.476.259.589,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 10.178.026.757,- atau persentase anggaran 97 ,15 % yang dialokasikan melalui program dibawah ini :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
- 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**
- 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**
- 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

### **C. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Dumai dan Kecamatan maka dilaksanakan rencana aksi yang berpedoman pada sasaran strategis dan indikator kinerja.

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), setiap Instansi Pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) secara tertulis, periodik dan melembaga. Akuntabilitas dimaksud dilaksanakan melalui langkah-langkah sistematis yang berturut-turut adalah Penetapan Indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja berikut Analisis Akuntabilitas Kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan Kecamatan Dumai Selatan pada Tahun 2022.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Kecamatan Dumai Selatan telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud dalam keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 ini. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan sasaran strategis tersebut, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program kegiatan masing-masing indikator yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**TABEL INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS BESERTA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahunan	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	persen	100	99.95	100
		Kualitas sumber daya lembaga masyarakat				
		Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat				

Pencapaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis di atas pada tahun 2022 adalah sebesar 100 % untuk indikator kinerja.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja pada Kecamatan Dumai Selatan merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Selatan untuk setiap pernyataan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2 berikut :

Tabel III.2

**TABEL PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN DUMAI SELATAN TAHUN 2022**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2022	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2022 terhadap Renstra 2021 (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik	100	100	99.95	100	100	100
2.	Kualitas sumber daya lembaga masyarakat						
3.	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat						

Dari Tabel Pengukuran Kinerja Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2022 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

#### a. Indikator Kinerja Sasaran : Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik

Target pencapaian realisasi kinerja tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 (100%), sementara realisasi capaian indikator pada

kondisi akhir Tahun 2022 adalah (99,95%) dan tingkat capaian sebesar (100%),

Hal ini disebabkan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur di Kecamatan Dumai Selatan masih perlu penyempurnaan, belum bisa memenuhi kebutuhan Kantor Camat Dumai Selatan yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan seperti mebeleur (meja, lemari arsip, kursi kerja, kursi rapat, kursi tunggu pelayanan), peralatan kantor (komputer, printer, AC, mesin fotocopy) dan perlengkapan kantor (kamera digital) dengan jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, tenaga honorer sebanyak 21 (dua puluh satu) orang dan Tenaga Persampahan sebanyak 12 (dua belas) Orang.

**b. Indikator Kinerja Sasaran : Kualitas sumber daya lembaga masyarakat**

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 (100%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2022 adalah (99,95%) dan tingkat capaian sebesar (100%). Untuk peningkatan kinerja LPMK dan RT di Kecamatan Dumai Selatan pada tahun 2022 diadakan Rapat Koordinasi (RAKOR) sebagai evaluasi kinerja terhadap pembinaan dan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dan menjalin silaturahmi. Selain itu untuk mendukung visi dan misi Walikota Dumai, dan untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah

pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Dalam pelayanan dibidang kesehatan, pembinaan Posyandu Balita dan Usila pada kader 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini dapat memotivasi para kader Posyandu kedepannya untuk lebih aktif bertugas dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, Kecamatan Dumai Selatan sudah melaksanakan Penilaian Lomba Kelurahan yang bertujuan untuk memotivasi para Lurah agar dapat meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, pembangunan dan sosial budaya dilingkungan kelurahannya.

**c. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat**

Target capaian indikator kinerja sasaran pada Tahun 2022 yang diakumulasi dari awal tahun rencana 2022 (100%), sementara realisasi capaian indikator pada kondisi akhir Tahun 2022 adalah (99,95%) dan tingkat capaian sebesar (100%), Capaian ini memenuhi target, dikaitkan dengan rencana tata ruang wilayah yang ditujukan untuk mengidentifikasi rencana pembangunan infrastruktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pembangunan pada Kecamatan Dumai Selatan dilaksanakan Musrenbang setiap tahunnya. Dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, jembatan maupun usulan rehabilitasi gedung dan anggaran untuk masyarakat diurutkan berdasarkan skala prioritas kebutuhan setiap tahunnya. Begitu juga untuk Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota Dumai. Dilihat dari awal tahun Rencana Strategis tahun 2022 ini pada Kecamatan Dumai Selatan, belum optimalnya peran musrenbang dalam penataan dan penggunaan ruang dan masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan akibat pasang surut air laut (banjir ROBB). Berdasarkan Perwako Dumai Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dibidang Persampahan, maka pada Tahun 2022 ini Kecamatan

Dumai Selatan sudah melaksanakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang kebersihan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan persampahan diwilayah kerja Kecamatan khususnya pada 5 (lima) Kelurahan. Kecamatan Dumai Selatan mempunyai petugas Persampahan dan Kebersihan sebanyak 12 (dua belas) orang petugas yang tersebar pada 3 (Tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bumi Ayu dan Kelurahan Ratu Sima. Cakupan pelayanan persampahan adalah lingkungan perumahan. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian lingkungan terhadap SITKAMTIBMAS, masyarakat dilingkungan Kecamatan Dumai Selatan sudah berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kamtibmas dilingkungan tempat tinggalnya melalui peningkatan program siskamling, pemberdayaan Linmas maupun penggunaan jasa Satpam. Setiap Lurah di Kecamatan Dumai Selatan mengupayakan pembangunan balai kemitraan yang diperuntukkan Bhabinkamtibmas dan FKPM untuk dijadikan menyelesaikan masalah sosial di setiap kelurahan. Selain itu berkoordinasi dengan Ketua RT dan masyarakat untuk pelaksanaan siskamling pada masing-masing RT. Dalam hal meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan, Kecamatan Dumai Selatan akan melibatkan elemen masyarakat maupun pihak Upika, sehingga akan mengurangi terjadinya konflik maupun masalah pencurian dilingkungan Kecamatan Dumai Selatan. Dengan kondisi ini keamanan dan ketertiban khususnya diwilayah Kecamatan Dumai Selatan akan aman dan terkendali.

Untuk peningkatan kinerja, honorarium LPMK dan RT telah dinaikkan secara bertahap sesuai dengan pagu anggaran. Perluasan informasi kepada masyarakat dalam bentuk kotak saran dan kritik maupun dalam bentuk SMS terkait masalah pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Namun demikian dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan masih ada kekurangannya, baik dari segi profesionalisme aparaturnya maupun sarana dan prasarana. Kecamatan hanya melakukan

tugas yakni mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dengan tetap mengacu pada prosedur dan aturan yang berlaku. 5 (lima) Kelurahan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dilihat pada tabel pencapaian indikator di atas, jika disandingkan capaian kinerja tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022, maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pada indikator Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan yang Baik, tahun 2020 (70%) dan tahun 2021 (85%) dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dan memenuhi target pada indikator kinerja yakni sebesar (99,95%)
2. Pada indikator Kualitas Sumber Daya Lembaga Masyarakat, capaian kinerja tahun tahun 2020 (70%) dan tahun 2021 (90%) persentase pada tahun 2022 naik dan memenuhi target pada indicator kinerja yakni sebesar 99,95%;
3. Pada indikator Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat, capaian kinerja tahun tahun 2020 (70%) dan tahun 2021 (90%) dan pada tahun 2022 persentase meningkat dan memenuhi target pada indicator kinerja yakni sebesar 99,95 %

Secara keseluruhan Kecamatan Dumai Selatan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 10.476.259.589,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 10.178.026.757.- atau 97,15% dengan realisasi Fisik sebesar 99,95%. Yang mengakomodir 5 Kelurahan termasuk dana Kelurahan 5 Program di Kecamatan Dumai Selatan. Jumlah ini tentunya sangat kecil dan belum mampu untuk mengakomodir berbagai Program dan Kegiatan Kecamatan, yang mencakup 5 ( Lima ) Kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya.

**A.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

- a. Indikator Kinerja Sasaran : ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik***

Target tahun 2022 cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik adalah 100%, Capaian tahun 2022 adalah 85 % atau sebesar 100%.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : ***Kualitas sumber daya lembaga masyarakat*** Target tahun 2022 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat adalah 100%, Capaian tahun 2022 adalah 100 % atau sebesar 100%.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : ***Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.***

Target tahun 2022 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat adalah 100%, Capaian tahun 2022 adalah 100 % atau sebesar 100%.

**A.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini (2022) dengan tahun lalu ( 2021 )**

- a. Indikator Kinerja Sasaran : ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik***

Pada tahun 2021 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik adalah sebesar 100%, sedangkan Capaian tahun 2022 Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik adalah 100 %.

- b. Indikator Kinerja Sasaran : ***Kualitas sumber daya lembaga masyarakat*** Pada tahun 2021 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat adalah sebesar 100%, sedangkan Capaian tahun 2022 Kualitas sumber daya lembaga masyarakat adalah 100 %.

- c. Indikator Kinerja Sasaran : ***Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.***

Pada tahun 2021 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat adalah 100% sedangkan Capaian Tahun 2022 Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat adalah 100% .

**A.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini (2022) dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

- a. Indikator Kinerja Sasaran : ***Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan yang baik***

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan

- b. Indikator Kinerja Sasaran : ***Kualitas sumber daya lembaga masyarakat*** Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan

- c. Indikator Kinerja Sasaran : ***Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat.***

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 sebesar 100 % dari target yang ditetapkan.

**A.4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja atau permasalahan dan alternatif solusi yang telah dilakukan.**

- A.4.1** Keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat dari pemenuhan indikator kinerja program yang telah ditetapkan

untuk masing-masing kegiatan tersebut. Perumusan keberhasilan pencapaian jika indikator keberhasilannya dapat diwujudkan adalah 97%, hal ini dapat dilihat pada pencapaian realisasi kinerja program dan kegiatan masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2022 untuk semua kegiatan tingkat keberhasilan realisasinya belum maksimal 97%, belum sesuai dengan target Renstra tahun 2021-2026
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut dan menyesuaikan dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja :

#### **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

##### **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 28.302.100,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 27.732.432,- atau 98,00%, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

##### **1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 7.593.200,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.572.200 atau 99,72 %.

##### **2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.271.900,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.057.300 atau 95,93 %.

- 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.061.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.061.500,- atau 100 %.
  - 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.906.100 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.694.900 atau 92,73 %.
  - 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.110.000 dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.110.000 atau 100 %.
  - 6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.413.100,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.296.532,- atau 97,85 %.
  - 7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.946.300,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.940.000,- atau 99,79 %.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 5.535.055.239,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp. 5.316.506.450,- atau 96,05%, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :
- 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 5.486.172.639,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 5.267.767.632,- atau 96,02 %.
  - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 39.891.300,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 39.891.218,- atau 100 %.
  - 3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**  
Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 4.472.700,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.329.000,- atau 96,79 %.

**4. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 4.518.600,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.518.600,- atau 100 %.

**Kegiatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 54.718.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 53.662.000,- atau 98,07 %.

**1. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 54.718.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 53.662.000,- atau 98,07 %.

**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 105.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 105.394.500,- atau 99,90%.

**1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 105.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 105.394.500,- atau 99,90%.

**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 355.004.627,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 349.581.216,- atau 98,47 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 6.454.900,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 6.062.866,- atau 93,93 %.

**2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 89.668.927,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 89.279.950,- atau 99,57 %.

**3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 57.910.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 54.910.000,- atau 94,82%.

**4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 36.974.800,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 36.571.600,- atau 98,91 %.

**5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 53.508.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 52.920.000,- atau 98,90 %.

**6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 110.488.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 109.836.800,- atau 99,41 %.

**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 222.547.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 219.783.250,- atau 98,76%, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 135.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 132.236.250,- atau 97,95 %.

**2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 24.272.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 24.272.000,- atau 100 %.

**3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 45.775.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 45.775.000,- atau 100 %.

**4. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 17.500.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 17.500.000,- atau 100 %.

**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 2.730.651.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.702.019.985,- atau 98,95%, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.398.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 1.053.000,- atau 43,90 %.

**2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 118.987.400,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 106.871.385,- atau 89,82 %.

**3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 2.609.265.600,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 2.594.095.600,- atau 99,42 %.

**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 639.352.423,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 623.427.847,- atau 97,51%, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan.**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 212.910.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 203.375.411,- atau 95,52 %.

**2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 15.820.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 12.144.000,- atau 76,76 %.

**3. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 391.697.423,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 391.328.463,- atau 99,91 %.

**4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 18.925.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 16.580.000,- atau 87,61 %.

**B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik  
Kegiatan Koordinasi Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 34.835.100,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 34.815.100,- atau 99,94 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 34.835.100,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 34.815.100,- atau 99,94 %.

**Kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 8.065.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.968.700,- atau 98,80 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwil.kecamatan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 8.065.250,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 7.968.700,- atau 98,80 %.

**Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 25.399.900,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 25.399.900,- atau 100 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 25.399.900,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 25.399.900,- atau 100 %.

**C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**

**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 624.428.450,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 603.246.450,- atau 96,30 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Peningkatan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 4.670.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 4.670.000,- atau 100 %.

**2. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 494.710.950,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 473.451.350,- atau 95,70 %.

**3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 127.047.500,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 125.125.100,- atau 98,49 %.

**D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

**Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 98.088.900,- atau 98,09 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 100.000.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 98.088.900,- atau 98,09 %.

**E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

**Kegiatan penyelenggaraan Urusan pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Jumlah Anggaran untuk program ini sebesar Rp 10.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 10.400.000,- atau 100 %, yang dialokasikan melalui kegiatan dibawah ini :

**1. Sub Kegiatan Pembinaan, kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, Ras dan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional**

Jumlah Anggaran untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp 10.400.000,- dan realisasi penyerapan Anggaran sebesar Rp 10.400.000,- atau 100 %.

#### **A.4.2 PERMASALAHAN**

Kendala-kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja Kecamatan Dumai Selatan antara lain adalah :

1. Tugas dan fungsi umum Camat sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagian besar melakukan tugas umum pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi. Hal ini menyebabkan Camat sulit untuk mengambil keputusan strategis untuk menjawab respon masyarakat terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi;
2. Keterbatasan kemampuan APBD Kota Dumai dalam mengaplikasikan/mengakomodir pembiayaan program maupun kegiatan di Kecamatan, sehingga tidak semua kegiatan dalam program dapat terlaksana dengan baik untuk mencapai sasaran strategis;
3. Belum memadainya sarana dan prasarana di Kecamatan sehingga belum mampu sepenuhnya menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Persoalan ini ditambah dengan kurangnya pemahaman dan tanggung jawab aparatur kecamatan/kelurahan dalam memahami tugas pokok dan fungsi yang telah diberikan;
4. Hasil musrenbang yang dilaksanakan pada setiap tahunnya pada tingkat kelurahan maupun kecamatan belum mampu mengakomodir setiap usulan pembangunan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi menghadiri kegiatan musrenbang baik yang diadakan kelurahan maupun kecamatan pada masa mendatang.

#### **A.4.3 Kendala / Hambatan**

Untuk menghadapi kendala tersebut Kecamatan Dumai Selatan telah mengambil langkah-langkah antisipasi antara lain :

- a. Penguatan fungsi koordinasi kepada OPD yang terkait dan Lembaga kemasyarakatan di Kelurahan;

- b. Melakukan penyesuaian kemampuan anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Renstra Kecamatan;
- c. Memaksimalkan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang ada guna peningkatan kinerja;
- d. Melakukan upaya pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up* selain Musrenbang untuk mengakomodir kepentingan dan keluhan masyarakat.

Selain itu analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja dibagi ke dalam 2 (dua) batasan yakni internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman). Kecamatan Dumai Selatan sebagai berikut :

**a. ANALISIS FAKTOR INTERNAL**

**Kekuatan** yang terdiri dari :

- PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan PP Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
- Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Keputusan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2003)
- Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar
- Adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up*
- Kuantitas aparatur yang memadai (ASN 42, TKS 2, TKPK/Honorar 35)

**Kelemahan** yang terdiri dari :

- Masih rendahnya kualitas ASN
- Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat
- Masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan
- Masih kecilnya peran Musrenbang
- Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang

**b. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL**

**Peluang** yang terdiri dari :

- Adanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)
- Adanya keleluasaan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Situasi pembangunan dan investasi yang kondusif
- Adanya lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang menunjang kegiatan pemerintah (RT, LPMK, Karang Taruna)
- Memiliki peluang untuk melakukan kerjasama dengan dunia usaha dalam kesertaan membangun wilayah dan masyarakat

**Ancaman** yang terdiri dari :

- Belum jelasnya peta koordinasi antar instansi
- Masih rendahnya semangat gotong royong dalam masyarakat
- Semakin kritisnya tuntutan masyarakat terhadap percepatan pembangunan daerah
- Tuntutan pelayanan prima
- Rendahnya kepedulian pihak pengusaha (swasta) yang berada di Kecamatan Dumai Selatan terhadap pembangunan wilayah dan masyarakat
- Kebijakan yang sering berubah

### C. REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan Kecamatan Dumai Selatan telah menganggarkan pembiayaan seluruh kegiatannya sebesar Rp. 10.476.259.589,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 10.178.026.757.- atau 97,15% dengan realisasi Fisik sebesar 99,95%. Gambaran realisasi kinerja dan Anggaran Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Tahun 2022 di sajikan dalam tabel berikut ini :

**TABEL III.3**  
**TABEL REALISASI ANGGARAN**  
**KECAMATAN DUMAI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

No Rek	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi s/d Bulan Desember 2022	%	Sisa Pagu Anggaran
<b>7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.593.200	7.572.200	99,72	21.000
7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.271.900	5.057.300	95,93	214.600
7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.061.500	2.061.500	100	-
7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.906.100	2.694.900	92,73	211.200
7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.110.000	2.110.000	100	-
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.413.100	5.296.532	97,85	116.568
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.946.300	2.940.000	99,79	6.300
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				-
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.486.172.639	5.267.767.632	96,02	218.405.007

**KECAMATAN DUMAI SELATAN**

7.01.01.2.02.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	39.891.300	39.891.218	100	82
7.01.01.2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.472.700	4.329.000	96,79	143.700
7.01.01.2.02.0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.518.600	4.518.600	100	-
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				
7.01.01.2.03.0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	54.718.000	53.662.000	98,07	1.056.000
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
7.01.01.2.05.0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	105.500.000	105.394.500	99,90	105.500
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				-
7.01.01.2.06.0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.454.900	6.062.866	93,93	392.034
7.01.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.668.927	89.279.950	99,57	388.977
7.01.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.910.000	54.910.000	94,82	3.000.000
7.01.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.974.800	36.571.600	98,91	403.200
7.01.01.2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.508.000	52.920.000	98,90	588.000
7.01.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110.488.000	109.836.800	99,41	651.200
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
7.01.01.2.07.0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.000.000	132.236.250	97,95	2.763.750
7.01.01.2.07.0 5	Pengadaan Mebel	24.272.000	24.272.000	100	-
7.01.01.2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	45.775.000	45.775.000	100	-
7.01.01.2.07.1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.500.000	17.500.000	100	-

## KECAMATAN DUMAI SELATAN

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.398.500	1.053.000	43,90	1.345.500
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.987.400	106.871.385	89,82	12.116.015
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.265.600	2.594.095.600	99,42	15.170.000
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	212.910.000	203.375.411	95,52	9.534.589
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	15.820.000	12.144.000	76,76	3.676.000
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	391.697.423	391.328.463	99,91	368.960
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.925.000	16.580.000	87,61	2.345.000
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>				
<b>7.01.02.2.01</b>	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>				
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	34.835.100	34.815.100	99,94	20.000
<b>7.01.02.2.02</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat daerah yang ada di kecamatan</b>				
7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	8.065.250	7.968.700	98,80	96.550
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat</b>				
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	25.399.900	25.399.900	100	-
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>				

**KECAMATAN DUMAI SELATAN**

<b>7.01.03.2.02</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>				
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	4.670.000	4.670.000	100	-
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	494.710.950	473.451.350	95,70	21.259.600
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	127.047.500	125.125.100	98,49	1.922.400
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>				
<b>7.01.04.2.03</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>				
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100.000.000	98.088.900	98,09	1.911.100
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>7.01.05.2.01.</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>				
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	10.400.000	10.400.000	100	-
	<b>TOTAL</b>	<b>10.476.259.589</b>	<b>10.178.026.757</b>	<b>97,15 %</b>	<b>298.232.832</b>

**Tabel III.4**  
**MATRIKS PERMASALAHAN SERTA LANGKAH ANTISIPATIF**  
**KECAMATAN DUMAI SELATAN TAHUN 2022**

NO	PERMASALAHAN	KONDISI YANG DIINGINKAN	LANGKAH ANTISIPATIF
1	Terbatasnya sumber daya manusia atau aparatur di kecamatan dan kelurahan sehingga ada beberapa bidang yang tidak maksimal melaksanakan kegiatan.	Terpenuhinya Pejabat dan Aparatur di Kelurahan dan kecamatan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan diimbangi dengan kualitas pengembangan diri.	Pembinaan kepada SDM di Kecamatan dan Kelurahan dilakukan secara antisipatif, dengan menerapkan sistem reward and punishment di Kecamatan Dumai Selatan. Selain itu diperlukan pembinaan secara keseluruhan dalam pemahaman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran dan perencanaan kegiatan.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Kecamatan Dumai Selatan yang dapat juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Rencana Strategis, Kecamatan Dumai Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kecamatan dalam rangka menunjang tercapainya Visi Kota Dumai.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dapat dilihat dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan beserta uraiannya di evaluasi pencapaian kinerja di atas. Terlihat seluruh kegiatan telah dapat tercapai dengan kinerja yang baik. Dengan demikian, secara umum Kecamatan Dumai Selatan telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di Kecamatan, serta membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pemerintahan umum.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Dumai Selatan Tahun 2022 ini kami susun sebagai laporan sekaligus sebagai pertanggungjawaban kepada Bapak Walikota Dumai dalam rangka turut menciptakan **good governance** and **clean government**.

CAMAT,  
  
Wahyu Wicaksono, S.I.P, M.Si  
Pembina  
NIP. 19870913 200701 1 002